



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BPPSDM TAHUN 2025

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP selama Tahun 2025, yang diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai instrumen penilaian kinerja kuantitatif, laporan kinerja ini diharapkan menjadi cerminan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP secara transparan dan bertanggung jawab, dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali dan pendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kami berharap, capaian Kinerja yang disajikan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada periode dimaksud.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan kerja sama, sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik. Semoga laporan ini memberikan manfaat optimal dan dapat dijadikan rujukan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang

Jakarta, 21 Januari 2026
Plt. Sekretariat BPPSDM KP



Joni Haryadi D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. TUJUAN.....	13
1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	15
1.5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. RENCANA STRATEGIS	17
2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025	21
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	23
2.4. PENGUKURAN KINERJA	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA.....	28
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	84
BAB IV. PENUTUP	93
4.1. KESIMPULAN	93
4.2. REKOMENDASI.....	96
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	22
Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	23
Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU	26
Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	29
Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP	32
Tabel 6. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	35
Tabel 7. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	38
Tabel 8. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	41
Tabel 9. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	42
Tabel 10. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak.....	46
Tabel 11. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	48
Tabel 12. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 15

Gambar 3. Keragaan PNS Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 93

IKHTISAR EKSEKUTIF

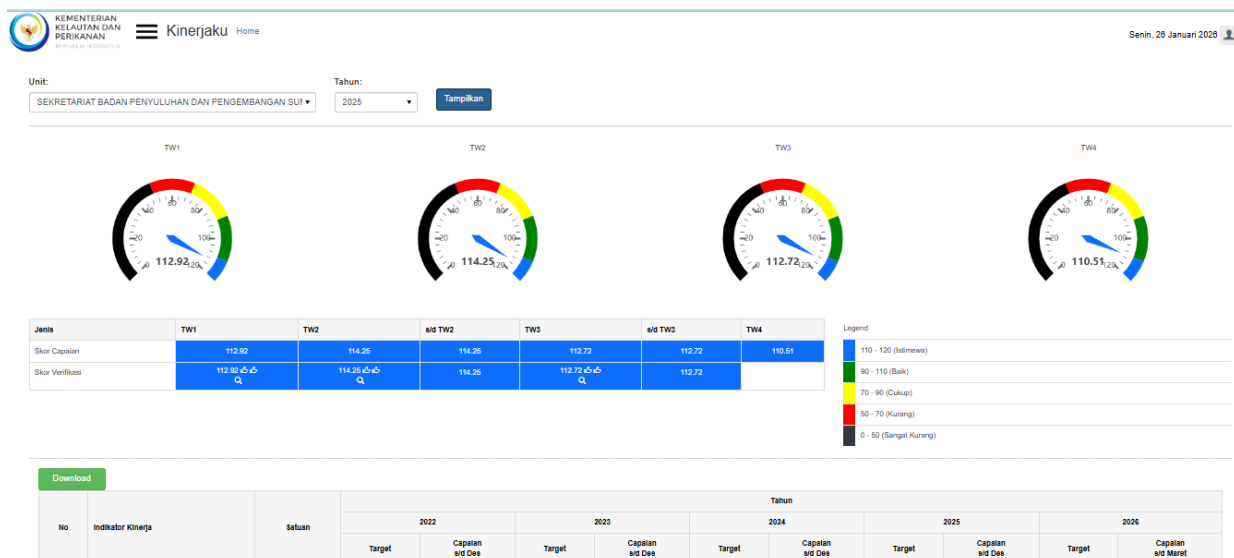
Sekretariat BPPSDMKP memiliki peran strategis sebagai koordinator kinerja pada enam unit teknis, yaitu Pusat Penyuluhan, Pusat Pelatihan, dan Pusat Pendidikan, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP dan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP. Lebih dari itu, Sekretariat BPPSDMKP juga berperan sebagai Unit Organisasi Pembina bagi 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPSDMKP.

Adapun UPT yang berada di bawah pembinaan Sekretariat BPPSDM meliputi :

1. Balai Riset Perikanan Laut
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil
7. Loka Riset Perikanan Tuna
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Sejalan dengan mandat tersebut, Sekretariat BPPSDMKP memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh capaian kinerja unit kerja yang berada di bawah pembinaannya. Secara berjenjang, proses ini menjadi bagian penting dari peran pembinaan guna menjamin akuntabilitas, validitas, dan keterbandingan data kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP tanggal 4 Desember 2025, capaian kinerja Sekretariat BPPSDM KP menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024 dari 103,53 menjadi 110,51, sebagaimana ditampilkan dalam *dashboard* kinerja berikut:



Gambar 1. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Sekretariat BPPSDMKP menetapkan 1 (satu) sasaran kinerja yang dijabarkan ke dalam 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja (IK) dan seluruhnya dilaporkan capaiannya pada Tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan status Istimewa dengan mayoritas indikator melampaui dan mencapai target. Tingkat capaian kinerja berada pada rentang 100% hingga 120%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi kesekretariatan dan pembinaan manajerial di lingkungan BPPSDMKP. Adapun rincian NKO Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **IK.01.** Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP dengan target 85%, telah tercapai sebesar 91,88%, atau telah tercapai 108,09% dari target yang ditetapkan.
2. **IK.02.** Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP dengan target $\leq 0,5\%$, telah tercapai sebesar 0,06%, atau telah tercapai 120% dari target yang ditetapkan.

3. **IK.03.** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP dengan target 92%, telah tercapai sebesar 96,52%, atau telah tercapai 104,91% dari target yang ditetapkan.
4. **IK.04.** Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP dengan target 3,5 level, telah tercapai sebesar 3,67 level, atau telah tercapai 104,86% dari target yang ditetapkan.
5. **IK.05.** Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP dengan target nilai 88, telah tercapai sebesar nilai 89,12, atau telah tercapai 101,27% dari target yang ditetapkan.
6. **IK.06.** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP dengan target nilai 81,50, telah tercapai sebesar nilai 98,53 , atau telah tercapai 120% dari target yang ditetapkan.
7. **IK.07.** Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP dengan target nilai 1,5, telah tercapai sebesar nilai 2,00, atau telah tercapai 120% dari target yang ditetapkan.
8. **IK.08.** Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas dengan target 80%, telah tercapai sebesar 90%, atau telah tercapai 112,50% dari target yang ditetapkan.
9. **IK.09.** Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP dengan target nilai 76, telah tercapai sebesar nilai 79,38, atau telah tercapai 104,45% dari target ditetapkan.
10. **IK.10.** Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP dengan target 81 indeks, telah tercapai sebesar 85,61 indeks, atau telah tercapai 105,69% dari target ditetapkan.
11. **IK.11.** Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP dengan target 65%, telah tercapai 65%, atau telah tercapai 100% dari target ditetapkan.

- 12.**IK.12.** Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP dengan target 5 Satuan Kerja, telah tercapai 5 Satuan Kerja, atau telah tercapai 100% dari target ditetapkan.
- 13.**IK.13.** Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP dengan target 100%, telah tercapai 100%, atau telah tercapai 100% dari target ditetapkan.
- 14.**IK.14.** Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP dengan target 2 rancangan, telah tercapai 3 rancangan, atau telah tercapai 120% dari target ditetapkan.
- 15.**IK.15.** Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani dengan target 100%, telah tercapai 100%, atau telah tercapai 100% dari target ditetapkan.
- 16.**IK.16.** Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP dengan target 110 dokumen, telah tercapai 210 dokumen, atau telah tercapai 120% dari target yang ditetapkan.
- 17.**IK.17.** Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP dengan target nilai 80, telah tercapai nilai 98,89, atau telah tercapai 120% dari target yang ditetapkan.
- 18.**IK.18.** Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP dengan target nilai 1 paket, telah tercapai 1 paket, atau telah tercapai 100% dari target ditetapkan.
- 19.**IK.19.** Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP dengan target 80%, telah tercapai 100%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
- 20.**IK.20.** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP dengan target 80%, telah tercapai 93,14%, atau 116,43% dari target yang ditetapkan.
- 21.**IK.21.** Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP dengan target nilai 77, telah tercapai nilai 87,10, atau 113,12% dari target yang ditetapkan.

- 22.**IK.22.** Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP dengan target nilai 92, telah tercapai nilai 87,04, atau 94,61% dari target yang ditetapkan.
- 23.**IK.23.** Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP dengan target 80%, telah tercapai 98,44%, atau 120% dari target yang ditetapkan.
- 24.**IK.24.** Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP dengan target 85%, telah tercapai 101,26%, atau 119,13% dari target yang ditetapkan.
- 25.**IK.25.** Nilai PNBP Lingkup BPPSDMKP dengan target 38,853 Miliar, telah tercapai 50,14 Miliar, atau 120% dari target yang ditetapkan.
- 26.**IK.26.** Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak dengan target 40%, telah tercapai 43,41%, atau 108,53 dari target yang ditetapkan.
- 27.**IK.27.** Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang disetujui Pimpinan Para Pihak dengan target 60%, telah tercapai 65,49%, atau 109,15% dari target yang ditetapkan.
- 28.**IK.28.** Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan target 65%, telah tercapai 73,21%, atau 112,63% dari target ditetapkan.

Berkenaan hasil capaian tersebut beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dipertahankan sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta mendorong pencapaian reformasi birokrasi. Untuk itu, pemantauan dan pengukuran kinerja harus dilakukan secara sistematis dan berkala, guna memitigasi hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
2. Dokumen atau bukti dukung capaian kinerja harus dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaporan kinerja yang disajikan.

3. Seluruh Indikator kinerja, khususnya yang belum mencapai target pada Tahun 2025, perlu mendapatkan pengawalan yang intensif pada tahun berikutnya jika IK tersebut masih dimunculkan kembali pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat BPPSDM tahun 2026.

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja. Hal yang sangat penting dalam penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja yang andal, evaluasi yang objektif, serta pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis kinerja secara memadai, sehingga informasi kinerja yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat BPPSDMKP perlu dilaksanakan secara terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan berwibawa, penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip *good governance* dan *clean government*, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan, pengembangan sumberdaya manusia, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembangaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan



dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik.
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.



2. TUJUAN

Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada setiap instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDMKP ini, bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja yang terukur dan objektif atas capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP selama Tahun 2025;
2. Mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan, sebagai dasar evaluasi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPSDMKP pada periode berikutnya.

3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kelembagaan Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretariat BPPSDMKP merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas BPPSDMKP bersama dengan 4 (empat) unit kerja eselon II (dua) lainnya yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
2. Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
3. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan; dan
4. Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

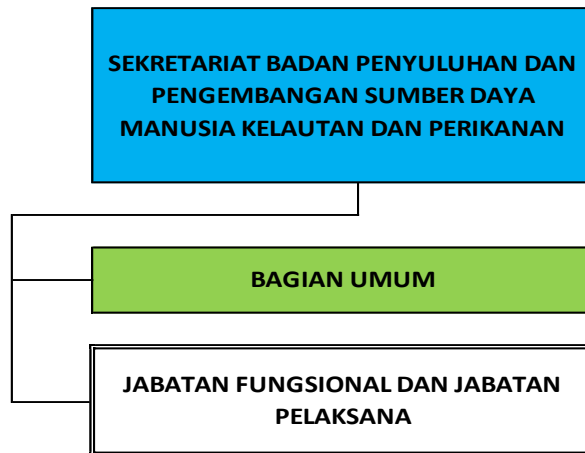
Sekretariat BPPSDMKP dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPPSDMKP. Sekretariat memiliki tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPPSDMKP dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.



Susunan organisasi Sekretariat BPPSDMKP terdiri atas bagian umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana gambar berikut:

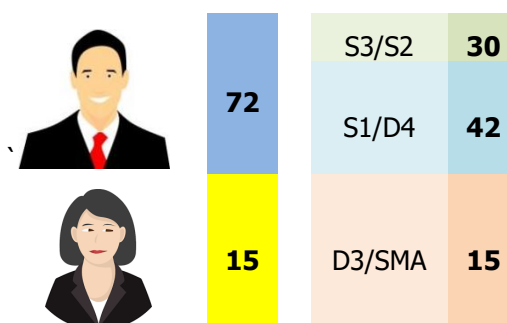


Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sekretariat BPPSDMKP didukung oleh 133 personil Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri atas 87 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan 4 Tenaga non ASN (PJLP). Dari total tersebut, terdapat 77 pegawai laki-laki dan 56 pegawai perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS Sekretariat BPPSDMKP sebanyak 30 orang berpendidikan S2/S3, sebanyak 42 orang berpendidikan S1/D4, serta sebanyak 15 orang berpendidikan D3/SMA (Data Kepegawaian, per Desember 2025).



Gambar 3. Keragaan ASN Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025

Sumber : Tim Kerja SDMAO Sekretariat BPPSDM

Adapun PPPK maupun PJLP hingga saat ini, belum ada pendataan berdasarkan tingkat Pendidikan. Selain itu, terdapat 3 pegawai sedang tugas belajar S2. Dari 133 jumlah ASN di Sekretariat BPPSDMKP, 3 orang diantaranya dipekerjakan/ditugaskan pada instansi lain.

5. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sistematika Laporan Kinerja Sekretariat BPPSDM KP Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, dengan susunan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan laporan yang mencakup tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, serta kendala yang dihadapi selama tahun 2025.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi gambaran umum tentang Sekretariat BPPSDM KP, meliputi tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai.
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini dijelaskan secara ringkas rancangan indikator kinerja Sekretariat BPPSDMKP 2025-2029, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja tahun 2025 serta pengukuran kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini menyajikan hasil capaian kinerja berdasarkan analisis indikator kinerja yang telah ditetapkan, disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
5. **Bab IV Penutup**, bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut dan langkah strategis pada periode mendatang dalam rangka peningkatan kinerja.
6. **Lampiran**, Perjanjian Kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2025-2029, dengan memiliki peran strategis dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut dirumuskan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 4; dan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas” yang melaksanakan Asta Cita

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2025, BPPSDMKP merupakan unit eselon I yang bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Sekretariat BPPSDMKP merupakan unit pendukung yang melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMKP.

A. Visi

Visi disusun berdasarkan visi Indonesia 2045 yaitu "Mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur." Selaras dengan itu, Visi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Sebagai instansi yang mendukung Presiden dalam urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan misi sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu *"Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan."*

B. Misi

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu "Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan". Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu *"Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional"*.

C. Tujuan

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu **"Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten**

dan Berdaya Saing” dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029.

Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Sasaran Kegiatan

Sekretariat BPPSDMKP mendukung pencapaian sasaran program Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029, khususnya pada Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, melalui 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP.
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP.
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP.
4. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP.
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

7. Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP.
8. Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas.
9. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP.
10. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP.
11. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP.
12. Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP.
13. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP.
14. Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP.
15. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang ditangani.
16. Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP.
17. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP.
18. Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDMKP.
19. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP.
20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP.
21. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP.
22. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP.
23. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP.



24. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP.
25. Nilai PNBK Lingkup BPPSDMKP.
26. Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak.
27. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati.
28. Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Dari 28 (dua puluh delapan) IK tersebut di atas, terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja bersifat mandatori yang mendukung pencapaian IKU Reformasi Birokrasi pada level I BPPSDM KP, yaitu indikator kinerja nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 17, 19, dan 21.

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis BPPSDMKP, Rencana Kerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025, selain menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan". Pencapaian sasaran tersebut diukur menjadi 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja.

Sejak Triwulan III Tahun 2024, terjadi perubahan profil rencana kerja Sekretariat BPPSDM seiring dengan penetapan unit organisasi pembina administrasi dan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPPSDMKP. Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana

Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat BPPSDMKP berperan sebagai Unit Pembina terhadap 9 (Sembilan) UPT sebagai berikut :

1. Balai Riset Perikanan Laut (BRPL) Jakarta;
2. Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok;
3. Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) Jatiluhur;
4. Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi;
5. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Bungus;
6. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul;
7. Loka Riset Perikanan Tuna (LRPT) Benoa;
8. Loka Riset Budidaya Rumput Laut (LRBRL) Gorontalo;
9. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LRPTK) Wakatobi.

Sejalan dengan dinamika tersebut, dukungan anggaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, sebagai berikut:

Tabel 1. Dukungan Anggaran Lingkup Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN SEMULA (Rp.)	REVISI ANGGARAN I (Rp.)	REVISI ANGGARAN II (Rp.)	REVISI ANGGARAN III (Rp.)
1	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	56.170.084.000	55.968.029	28.096.561.000	32.734.702.000
2	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	64.189.144.000	64.189.144.000	43.777.215.000	43.370.651.000

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025, 11 Agustus 2025, 30 September 2025 dan 4 Desember 2025

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan wujud komitmen pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit kerja pembinaanya dalam melaksanakan amanah dan target kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014.

Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDM Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dan mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- a. Revisi I : ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 2025 karena revisi pemenuhan Satuan Kerja baru (Pusat Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
- b. Revisi II : ditandatangani pada tanggal 30 September 2025 karena adanya pergantian Sekretaris Badan dan perubahan anggaran serta target;
- c. Revisi III : ditandatangani pada tanggal 4 Desember 2025 karena adanya revisi penyesuaian Renstra dan pagu akhir

Perjanjian Kinerja tersebut pada revisi I sampai II tetap dengan 1 (satu) sasaran kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja, namun pada revisi III menjadi 1 (satu) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 2. PK Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi I	Target Revisi II	Target Revisi III
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	85	85	85	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	92	92	92	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	3,5	3,5	3,5	3,5

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi I	Target Revisi II	Target Revisi III
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	88	88	88	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	81,5	81,5	81,5	81,5
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	1,5	1,5	1,5	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	80	80	80	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	76	76	76	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	82	81	81	81
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	65	65	65	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	5	5	5	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	100	100	100	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	2	2	2	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	100	100	100	100
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	80	100	110	110
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	80	80	80	80
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP	1	1	1	1
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	80	80	80	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	80	80	80	80
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	77	77	77	77
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	92	92	92	92
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	80	80	80	80
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel	85	85	85	85

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi I	Target Revisi II	Target Revisi III
			Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP				
		25	Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP	14,250	14,250	14,250	38,853
		26	Nilai PNBP pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP	24,608	24,608	24,608	
		27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	40	40	40	40
		28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	45	60	60	60
		29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	65	65	65	65

Sumber : PK Sekretariat BPPSDMKP tanggal 24 Januari 2025, 11 Agustus 2025, 30 September 2025 dan 4 Desember 2025

2.4. PENGUKURAN KINERJA

2.4.1 Teknik Penghitungan

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil perbandingan tersebut dikonversikan menjadi indeks capaian IKU. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Capaian maksimum adalah 120%
2. Capaian minimum adalah 0%
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda; dan
4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Status Indeks Capaian IKU

Warna	Rentang Nilai	Status Indeks
	Nilai 110 - 120	Istimewa
	Nilai 90 - <110	Baik
	Nilai 70 - <90	Cukup
	Nilai 50 - <70	Kurang
	Nilai <50	Sangat Kurang
		Belum ada penilaian

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

2.4.2 Tata Cara Pengukuran Kinerja

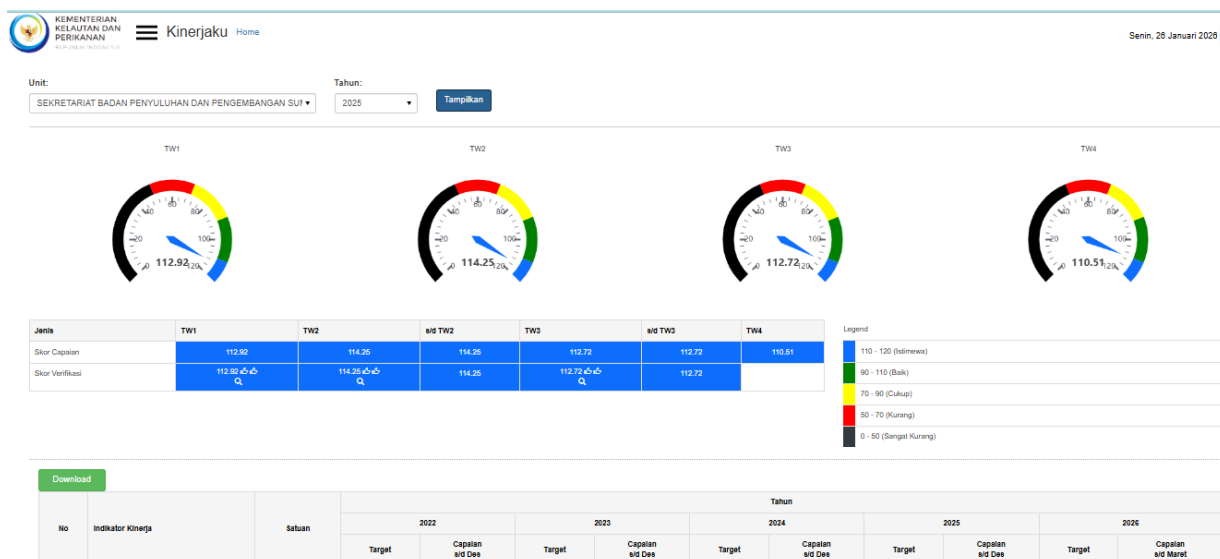
Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPSDMKP dilakukan setiap triwulan, yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Kerja Monev dan Pelaporan, dimulai dari masing-masing penanggung jawab IKU hingga ke level Pimpinan. Tahapan akhir dari proses ini adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja, untuk memastikan kesesuaian antara capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku dan data dukung yang dilampirkan oleh satuan kerja terkait.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Proses pencatatan dan pengukuran kinerja dilaksanakan dengan Aplikasi Kinerjaku, yaitu sistem informasi kinerja yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai capaian kinerja meningkat dari 103,53 pada Tahun 2024 menjadi 110,51 pada Tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut ditampilkan dalam Aplikasi Kinerjaku, sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

Sumber : Aplikasi Kinerjaku Tahun 2025

Pada Tahun 2025 Sekretariat BPPSDMKP melaksanakan Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari 28 indikator kinerja utama dengan hasil pengukuran pada tahun 2025 sebagai berikut:

- 14 IKU berkinerja Baik (nilai 90 - < 110)
- 14 IKU berkinerja Istimewa (nilai 110 – 120)

Capain tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja telah mencapai hasil yang optimal. Kinerja ini menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM KP, yang pada tahun 2025 masuk dalam kategori Istimewa, sesuai dengan indeks penilaian pada Aplikasi Kinerjaku.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, meliputi 1) perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan, 2) perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, serta 3) pencapaian target jangka menengah. Selanjutnya analisis kinerja juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan maupun faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, berdasarkan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 4 2025	Capaian 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	91,88	108,09
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	≤0,5	≤0,5	0,06	120,00
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92	92	96,52	104,91
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5	3,5	3,74	106,86
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88	88	89,12	101,27
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5	81,5	98,53	120,00
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5	1,5	2,00	120,00
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80	80	90	112,50
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76	76	79,38	104,45
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	81	81	85,61	105,69
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65	65	65	100,00
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5	5	5	100,00
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100	100	100	100,00

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 4 2025	Capaian 2025	%
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2	2	3	120,00
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100	100	100	100,00
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	110	110	210	120,00
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80	80	98,89	120,00
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	unit	1	1	1	100,00
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120,00
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80	80	93,14	116,43
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77	77	87,10	113,12
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92	92	87,04	94,61
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	80	98,44	120,00
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	85	101,26	119,13
		25	Nilai PNBK BPPSDMKP	Miliar	38,85	38,85	50,14	120,00
		26	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan	%	40	40	43,41	108,53

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 4 2025	Capaian 2025	%
			Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak					
		27	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	60	60	65,49	109,15
		28	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65	65	73,21	112,63

Sumber: Aplikasi Kinerja

SASARAN KEGIATAN -1

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" didukung oleh 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP mengukur jumlah rekomendasi hasil pengawasan inspektorat jenderal (meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit dan telah diinput pada aplikasi SIDAK pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s/d Triwulan III Tahun 2025 (1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025). Status tindak lanjut yang dimaksud adalah "TUNTAS" oleh seluruh satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP

IK 1- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
84,09	88,73	81,23	86,26	91,85	85	91,88	108,09	0,03	89	103,24

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini pada tahun 2025 sebesar 91,88% atau 108,09% dari target sebesar 85%. Berdasarkan Surat Sekretaris BPPSDM KP Nomor B. 185/BPPSDM.1/RC.610/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Tahun 2024, bahwa capaian indikator Kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 91,85%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2025, maka capaian mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Sementara capaian IK ini pada tahun 2020 sebesar 84,09%, tahun 2021 sebesar 88,73%, 2022 sebesar 81,23% dan tahun 2023 sebesar 86,26%. Jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 103,24%. Capaian Kinerja jika dibandingkan dengan IK yang sama pada BPPMH KP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDM KP	91,88%	BPPMHKP	85,34%

Sumber: Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 tanggal 8 Januari 2026

Dari tabel di atas, capaian BPPSDM KP pada IK ini sebesar 91,88%, lebih tinggi 6,54% dari capaian BPPHM KP. Adapun faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini antara lain komitmen pimpinan dan pengawalan bersama melalui rapat/koordinasi yang kontinyu dengan melibatkan tim Inspektorat Jenderal KKP dan kontinyunya pemantauan oleh PIC tindaklanjut rekomendasi LHE Inspektorat Jenderal KKP pada timja Keuangan kepada PIC pada Satuan Kerja *Auditeed*.

Kegiatan pendukung pencapaian indikator ini, antara lain : 1) melakukan pendampingan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; 2) Rekonsiliasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;

INDIKATOR KINERJA 2

Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP

Indikator Kinerja Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP merupakan nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPPSDMKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPPSDMKP tahun 2024.

Tingkat Validitas Indikator ini merupakan output tingkat kendali rendah. Sementara pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 7. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP

IK 2- Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
0,025	0,02	0,01	0,003	0,5	0,05	0,06	120	20,00	0,05	120

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini pada tahun 2025 sejumlah 0,06% dari target senilai $\leq 0,5\%$ (120%), jika dibandingkan dengan capaian 2024 terdapat kenaikan 20,00%. Capaian IK ini bervariasi selama 5 tahun, yaitu tahun 2020 sejumlah 0,025%, 2021 sejumlah 0,02%, 2022 sejumlah 0,01%, dan 2023 sejumlah 0,003%. Jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah mencapai target Renstra sebesar 120%.

Sementara apabila Capaian Indikator ini dibandingkan dengan IK yang sama pada BPPMHKP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK tahun 2025

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDM KP	0,5	BPPMHKP	0,5

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Desember 2025

Dari tabel terlihat bahwa capaian IK ini sama pada BPPSDMKP maupun BPPMHKP, faktor pendukung keberhasilan indikator ini adalah komitmen pimpinan dan pengawalan bersama melalui koordinasi yang kontinyu dengan melibatkan tim PHP Itjen KKP selaku fasilitator validasi dan pemutakhiran tindak lanjut rekomendasi BPK RI, selain itu kontinyunya pemantauan oleh PIC tindaklanjut rekomendasi BPK RI pada Satuan Kerja terkait.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja dimaksud antara lain : 1) Rekapitulasi temuan dan penyampaian kepada Satuan Kerja; 2) melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI terhadap LK KKP dengan Biro Keuangan dan Inspektorat Jenderal terkait hasil rekomendasi pengawasan BPK pada tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA 3

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)

dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pengukuran dilakukan berdasarkan variabel berikut : a) Penyerapan Anggaran (bobot 20%); b) Pengelolaan Uang Persediaan (10%); c) Penyelesaian Tagihan (20%); d) Deviasi Halaman III DIPA (11); e) Penyampaian Data Kontrak; f) Penyampaian LPJ Bendahara; g) Revisi DIPA; h) Pengembalian/Kesalahan SPM; i) Dispensasi SPM; j) Renkas/RPD Harian; k) Retur SP2D (masing masing 5%).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Periode pengukuran adalah semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP

IK 3- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
95,55	95,21	93,71	94,05	96,08	92	96,52	104,91	0,46	92,2	104,69

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Realisasi capaian IK pada tahun 2025 ini berdasar Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025 diketahui bahwa nilai IKPA BPPSDMKP sebesar 96,52 atau 104,91% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, dan terjadi kenaikan sebesar 0,46% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024. Capaian IK ini selama 5 tahun bervariasi, yaitu tahun 2020 sebesar 95,55, 2021 sebesar 95,21, 2022 sebesar 93,71, dan 2023

sebesar 94,05. Capaian IK ini dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 104,69%. Berdasar tabel berikut, capaian Indikator ini jika dibandingkan dengan IK yang sama pada BPPMHKP, KKP, yaitu :

Tabel 10. Perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDM KP	96,52	BPPMHKP	94,64

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Desember 2025

Capain IK ini pada BPPSDM KP sebesar 96,52, lebih tinggi sebesar 1,88 daripada BPPMHKP sebesar 94,64. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IK pada tahun 2025 ini antara lain :

- Komitmen Pimpinan dalam mengarahkan dan melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran;
- Pengorganisasi monitoring dan pelaporan IKPA dalam bentuk tim operator aplikasi SAKTI modul komitmen;
- Kepatuhan mengikuti peraturan/pedoman/ketentuan pelaksanaan anggaran;
- Internalisasi, koordinasi, dan pemantauan langsung dan berjenjang SDM pemantau dan penyaji monitoring IKPA lingkup BPPSDM KP secara berkala;
- Pemanfaatan analisa risiko tahun sebelumnya/progres berjalan untuk perbaikan aksi dan pengawalan capaian kinerja IKPA sesuai target.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan IK IKPA BPPSDMKP Tahun 2025, yaitu fasilitasi revisi Halaman III DIPA oleh Sekretariat BPPSDM tahun 2025 dan melakukan monitoring pengawalan IKPA lingkup BPPSDM oleh Sekretariat BPPSDM tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA 4

Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN yang berisi sumber data dari Inspektorat Jenderal. Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (1) Lingkungan Pengendalian, (2) Penilaian Risiko (3) Kegiatan Pengendalian, (4) Informasi dan Komunikasi (5) Pemantauan. Tingkatan maturitas SPIP meliputi: rintisan, berkembang, terdefinisi, terkelola dan terukur, dan optimum. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP

IK 4- Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
3	3	3	3,80	3,75	3,50	3,74	106,86	-0,27	3,9	95,90

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini pada tahun 2025 memperoleh nilai 3,74 dari target 3,5 (106,86), terdapat penurunan sebesar 0,27% dari capaian pada tahun 2024. Capaian IK ini pada tahun 2020-2022 senilai 3, dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 senilai 3,8. Jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 95,90%, dan apabila dibandingkan dengan unit organisasi eselon I yang memiliki IK yang sama lingkup KKP, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12. Hasil Penjaminan Kualitas atas PM Maturitas Struktur dan Proses SPIP Tahun 2025 Tingkat Eselon I KKP

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	3,743	BPPMHKP	3,747

Sumber: Nota Dinas Ka Biro Keuangan dan BMN Nomor 3447/SJ.2/TU.210/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025

Berdasar tabel di atas, capaian IK ini pada BPPSDMKP maupun pada BPPMHKP sama yaitu, senilai 3,74. Adapun faktor pendukung keberhasilan IK ini tahun 2025, yaitu komitmen pimpinan, integrasi SPIP dalam perencanaan dan penganggaran, peningkatan kompetensi SDM, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Sementara kegiatan yang mendukung capaian IK tersebut pada tahun 2025, antara lain : 1) penyusunan SK Maturitas SPIP lingkup BPPSDMKP; 2) pengisian kertas kerja struktur dan proses; 3) melakukan koordinasi pemenuhan data pendukung penilaian data maturitas melalui Rekonsiliasi Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP; 4) pembinaan identifikasi resiko, pengendalian dan pemantauan manajemen resiko Satuan Kerja; 5) penjaminan mutu oleh mitra melalui Rekonsiliasi Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP.

INDIKATOR KINERJA 5

Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP merupakan Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara mandiri berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Aspek penilaian mencakup :

- perencanaan kinerja (30%)
- pengukuran kinerja (30%)
- pelaporan kinerja (15%)
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan capaian Unit Eselon I dan dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, melalui surat resmi.

Pengukuran Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP adalah tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 13. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP

IK 5- Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
87,93	86,65	81,22	84,33	88,79	88	89,12	101,27	0,37	88,88	100,27

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini pada tahun 2025 senilai 89,12 dari target 88 (101,27%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terdapat kenaikan 0,37%. Capaian ini selama 5 tahun bervariasi, tahun 2020 senilai 87,93, tahun 2021 senilai 86,65, tahun 2022 senilai 81,22 dan tahun 2023 senilai 84,33. Jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 100,27%. Capaian IK ini pada tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan BPPMHKP, diperoleh data pada tabel berikut :

Tabel 14. Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDM KP	89,12	BPPMHKP	88,39

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Desember 2025

Capaian IK ini pada BPPSDMKP tahun 2025 senilai 89,12 lebih besar senilai 0,73 dibanding BPPMHKP senilai 88,39. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian IK Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP tahun 2025, antara lain :

- Komitmen Pimpinan dalam mengarahkan dan melakukan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja BPPSDMKP

- Pengorganisasi pengelolaan kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPSDM KP
- Kepatuhan mengikuti peraturan dan pedoman pengelolaan kinerja KKP
- Internalisasi dan koordinasi langsung dan berjenjang SDM Pengelola kinerja dalam mengawal perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja BPPSDMKP
- Pengukuran dan Pemantauan berkala rencana aksi dan target pencapaian kinerja sesuai prognosa
- Pemanfaatan analisa tahun sebelumnya untuk perbaikan AKIP tahun berjalan

Sementara kegiatan yang mendukung pencapaian IK Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM tahun 2025, antara lain :

- penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Rencana Kinerja KKP yang didalamnya termaktub indikator dan target kinerja BPPSDM, pohon kinerja, penetapan kinerja level 1,2 dan 3 lingkup BPPSDM tahun 2025 dan RKA KL Satuan Kerja lingkup BPPSDM);
- penyusunan dokumen pengukuran kinerja (pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2025, penginputan capaian kinerja level 1,2 dan 3 pada aplikasi kinerjajaku, tersedia data dukung capaian kinerja triwulan IV tahun 2025, verifikasi dan validasi bukti dukung level 2 dan level 3 BPPSDM, penyampaian data dukung level 1,2 dan 3 terverifikasi kepada atasan langsung;
- penyusunan dokumen pelaporan kinerja (penyusunan LKj TW I, II dan III level I BPPSDM tahun 2025, penyusunan LKj TW I, II dan III level II Sekretariat BPPSDM tahun 2025, proses penyusunan LKj level I BPPSDM Triwulan IV tahun 2025 dan level II Sekretariat BPPSDM Triwulan IV tahun 2025)
- penyusunan dokumen evaluasi kinerja (penyusunan dokumen evaluasi rencana aksi Triwulan I, II, dan III tahun 2025 level I BPPSDMKP dan level II Sekretariat BPPSDMKP, proses penyusunan dokumen evaluasi rencana aksi Triwulan IV tahun 2025 level I BPPSDMKP dan level II Sekretariat BPPSDMKP)

INDIKATOR KINERJA 6

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

Nilai Kinerja Anggaran merupakan nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran tahun sebelumnya, bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Formula pengukuran sesuai manual IKU didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun indikator dimaksud yaitu: Nilai Efektivitas Satker, Nilai Efisiensi Satker, Bobot Capaian Indikator Kinerja Program, Bobot Nilai Efektivitas Satker, dan Bobot Nilai Efisiensi Satker.

Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP

IK 6- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	95,28	81,50	98,53	120	3,41	82,5	119,43

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 98,53 atau 120% dari target yang ditetapkan sebesar 81,50. Indikator kinerja ini baru ada pada tahun 2024 dan jika dibandingkan dengan capaiannya dengan tahun 2025, mengalami kenaikan sebesar 3,41%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 119,43%.

Jika dibandingkan dengan BPPMHPK pada IK yang sama sebagaimana tabel berikut :

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I di lingkungan KKP Tahun 2025

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	98,53	BPPMHPK	89,11

Sumber: Nota Dinas Ka Biro Keuangan dan BMN Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026

Dari tabel di atas capaian BPPSDM pada IK ini dibandingkan dengan BPPMHPK terdapat selisih nilai sebesar 9,42, dan nilai NKPA BPPSDMKP paling tinggi dibandingkan eselon I lainnya lingkup KKP. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian IK tersebut antara lain :

- Komitmen Pimpinan dalam mengarahkan dan melakukan pembinaan perencanaan anggaran;
- Pengorganisasi monitoring dan pelaporan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dalam bentuk tim operator aplikasi bidang monev yang ditetapkan dengan keputusan Ka. BPPSDMKP;
- Kepatuhan mengikuti peraturan/pedoman/ketentuan pengelolaan anggaran;
- Internalisasi, koordinasi, dan pemantauan langsung dan berjenjang SDM pemantau dan penyaji laporan NKPA lingkup BPPSDMKP secara berkala;
- Pemanfaatan analisa risiko tahun sebelumnya/progres berjalan untuk perbaikan aksi dan pengawalan capaian kinerja NKPA sesuai target.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP tahun 2025 antara lain : 1) Melakukan pemantauan pemantauan SBK dan efisiensi SBK pada Aplikasi Monev Kemenkeu; 2) Monitoring triwulan nilai kinerja perencanaan anggaran oleh Biro Keuangan dan menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan terkait *tagging* SBK terhadap penilaian NKPA; 3) Melakukan penginputan manual indikator kinerja sasaran program pada aplikasi SAKTI; 4) Melakukan penginputan capaian kinerja sasaran program pada aplikasi SAKTI.

INDIKATOR KINERJA 7

Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP

Nilai Komponen Penetapan Tujuan merupakan hasil Penilaian Mandiri, berupa Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian dan Sasaran Strategis, dengan bobot 40% dalam penilaian maturitas SPIP

Penilaian dilakukan secara mandiri (PM) oleh Unit Kerja Eselon I dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 17. Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP

IK 7- Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Maturitas SPIP BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set.BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	-	1,50	2	120	-	1,9	105,26

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini tahun 2025 memperoleh nilai 2, atau tercapai 120% dari target yang ditetapkan senilai 1,5. IK ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika dibandingkan dengan target 2029 pada rancangan IK Set.BPPSDM tahun 2025-2029 tercapai 105,26%.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IK Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Maturitas SPIP BPPSDMKP tahun 2025, yaitu penetapan Renstra KKP tepat waktu dan efektifnya koordinasi dengan tim Biro Perencanaan dan tim BPKP.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian IK Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Maturitas SPIP BPPSDMKP tahun 2025, antara lain :

- Penyampaian masukan narasi draft Renstra KKP pada bulan Agustus 2025 dan penyusunan draft Renstra BPPSDM 2025-2029 terupdate pada 29 September 2025;
- Penyusunan dokumen Rencana Kerja KKP tahun 2025 yang didalamnya termaktub indikator dan target BPPSDM;
- Penyusunan usulan indikator dan target BPPSDM pada Rencana Kerja KP tahun 2026;
- Pengisian kertas kerja komponen penetapan tujuan pada penilaian Maturitas SPIP BPPSDMKP;
- Penyusunan konteks sasaran program unit eselon I;
- Pengisian kertas kerja komponen pencapaian tujuan pada penilaian Maturitas SPIP BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA 8

Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang Berkualitas

Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Aspek ini menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mencakup 2 indikator, yaitu : (1) Pengelolaan belanja lingkup BPPSDM yang berkualitas dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penelaahan revisi anggaran, persetujuan revisi anggaran, pengajuan revisi anggaran dan surat persetujuan revisi anggaran. (2) Perencanaan anggaran BPPSDM yang akurat dengan bobot 50%, yang terdiri dari komponen penyusunan pagu awal, penyusunan pagu anggaran, *quality control* pagu anggaran dan penerbitan dokumen penganggaran.

Sementara Pengelolaan Belanja Lingkup BPPSDM terdiri dari komponen: Penelaahan Revisi Anggaran, Persetujuan Revisi Anggaran, Pengajuan Revisi Anggaran, dan Surat Persetujuan Revisi Anggaran. Sedangkan Perencanaan Anggaran BPPSDM yang Akurat terdiri dari komponen: Penyusunan Pagu Awal, Penyusunan Pagu Anggaran, Quality Control Pagu Anggaran, Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran, Quality Control Alokasi Anggaran, dan Penerbitan Dokumen Penganggaran.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 18. Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang Berkualitas

IK 8- Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	86,79	80	90	112,50	3,70	84	107,14

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 90% atau sebesar 112,50% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 3,70%. Jika dibandingkan dengan target Rancangan IK Set.BPPSDM Tahun 2025-2029 sebesar 107,14%.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian IK Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas tahun 2025, antara lain : 1) Akuratnya penyusunan Revisi Anggaran Lingkup BPPSDMKP; 2) Akuratnya Penyusunan Anggaran 2026 Lingkup BPPSDMKP; 3) Keefektifan dan keakuratan koordinasi penelaahan revisi anggaran 2025 dan penyusunan anggaran 2026 dengan Tim Inspektorat, Tim Setjen dan Kementerian Keuangan.

Sementara kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pencapaian IK Indeks Perencanaan Anggaran BPPSDMKP yang berkualitas tahun 2025, antara lain :

- Penyusunan Perencanaan anggaran yang meliputi kegiatan penyusunan pagu indikatif 2026 lingkup BPPSDM pada 43 Satuan Kerja lingkup BPPSDMKP, penelaahan anggaran dengan tim Inspektorat Jenderal KKP dan Kemenkeu, serta penelaahan revisi anggaran dengan tim Inspektorat Jenderal dan Kemenkeu;
- Fasilitasi proses usulan revisi anggaran unit eselon I BPPSDM, yaitu pada kegiatan revitalisasi sarana prasarana Pendidikan;
- Penginputan SAKTI dalam rangka penelaahan pagu indikatif tahun 2026 lingkup BPPSDM.

INDIKATOR KINERJA 9

Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan BPPSDM.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi : Pembangunan zona integritas (bobot 30%), Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%), Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%), Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%), Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%), Pengendalian Kecurangan (bobot 10%). Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 19. Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP

IK 9- Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	-	76	79,38	104,45	-	80	99,23

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini tahun 2025 senilai 79,38 atau sebesar 104,45% dari target yang ditetapkan senilai 76. Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu juga capaiannya dibandingkan dengan target rancangan IK Set.BPPSDM Tahun 2025-2029 sebesar 99,23%. Jika IK ini jika dibandingkan dengan BPPMHKP pada tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 20. Hasil Pemantauan Nilai Pembangunan Integritas Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	79.38	BPPMHKP	78.18

Sumber: Surat Dinas Inspektur V Nomor T.953/ITJ.5/HP.550/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025

Dari tabel di atas capaian BPPSDMKP senilai 79,38 dan capaian BPPMHKP senilai 78,18, terdapat selisih nilai 1,2 lebih tinggi BPPSDMKP. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Indikator kinerja ini antara lain :

- Penetapan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkup BPPSDMKP dan Tim Penanganan Pengaduan lingkup BPPSDMKP;
- Ketepatan waktu penyelesaian disposisi laporan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! oleh Tim Penanganan Pengaduan Eselon I hingga tuntas;
- Komitmen seluruh Pejabat dan Pegawai lingkup BPPSDMKP untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan bagi Pegawai Wajib Lapo LHKPN dan Pegawai Non Wajib Lapo LHKPN tepat waktu;

- Partisipasi aktif Unit Kerja lingkup BPPSDMKP untuk melakukan identifikasi dan mitigasi risiko fraud melalui penyusunan MR KKN;

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai Indikator kinerja ini antara lain :

- Rekapitulasi Laporan harta kekayaan bagi pegawai wajib lapor LHKPN lingkup BPPSDM pada bulan Maret 2025;
- Penerbitan SK Tim Penanganan Pengaduan (TPP) BPPSDMKP atas revisi SK bulan Januari, dikarenakan penambahan Pusat Baru (Pusat Standardisasi);
- Penerbitan SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) BPPSDMKP atas revisi SK bulan Januari, dikarenakan penambahan Pusat Baru (Pusat Standardisasi);
- Penetapan agen SPAK lingkup BPPSDMKP yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2024 dengan bukti dukung sertifikat pelatihan;
- Sosialisasi evaluasi pengelolaan konflik kepentingan dengan menghadirkan narasumber profesional dari eksternal (Universitas Indonesia);
- Evaluasi pengelolaan konflik kepentingan oleh unit sampling, dengan telah terbitnya laporan hasil pemantauan terkait pengelolaan konflik kepentingan oleh Inspektorat dan tindak lanjut laporan hasil pemantauan terkait pengelolaan konflik kepentingan oleh Inspektorat.

INDIKATOR KINERJA 10

Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 21. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP

IK 10- Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
77,88	79,73	79,94	86,12	86,23	81	85,61	105,69	-0,72	83	103,14

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP tahun 2025 (indeks) sebesar 85,61 atau sebesar 105,69% dari target yang ditetapkan senilai 81. Capaian IK ini selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan, yaitu tahun 2020 senilai 77,88, 2021 senilai 79,73, 2022 senilai 79,94 dan 2023 senilai 86,12. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,72% dikarenakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan mengalami penyesuaian instrumen pengukuran berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor:4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi

dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5. Penyesuaian instrumen pengukuran terdapat pada dimensi kompetensi berupa bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal. Sedangkan bila dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 103,14.

Sementara IK ini jika dibandingkan dengan unit organisasi Eselon I lingkup KKP pada tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 22. Rekapitulasi Nilai IP ASN di lingkungan KKP Semester II Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja Eselon

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	85,61	BPPMHKP	85,94

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro SDMAO Nomor 8/SJ.3/TU.210/I/2026 tanggal 4 Januari 2026

Dari tabel di atas, capaian BPPSDMKP pada IK ini sebesar 85,61, masih lebih rendah dari BPPMHKP sebesar 85,94. Adapun faktor yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 antara lain :

- Keaktifan Pengelola SDM lingkup BPPSDM dalam menyampaikan informasi pelaksanaan pelatihan daring melalui whatsapp group Kepegawaian BPPSDM;
- Kontinuitas monitoring pada dashboard IPASN KKP (ropeg.kkp.go.id) dan penyampaian hasil monitoring dashboard kepada Pengelola SDM lingkup BPPSDM untuk tindak lanjut peningkatan IP ASN lingkup masing-masing;
- Keaktifan pegawai lingkup BPPSDM dalam mengikuti pelatihan dan melakukan penginputan sertifikat melalui MyASN nya masing-masing;
- Keaktifan operator SIASN dalam melakukan updating data pegawai pada SIASN dan perbaikan permasalahan sistem dalam SIASN terkait komponen penilaian IP ASN (Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan Kedisiplinan).

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2025 antara lain : 1) sharing informasi pelatihan kepada pegawai lingkup BPPSDM sejumlah periode triwulan I,II, III dan IV; 2) melakukan monitoring aplikasi melalui updating progres capaian IP ASN tahun 2025 lingkup BPPSDMKP melalui aplikasi penyimpanan.

INDIKATOR KINERJA 11

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis BPPSDM terdiri atas: Probis Level 1, Probis Level 2 dan Probis Level 3.

Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Pengukuran indikator kinerja ini dengan variabel sebagai berikut:

1. Penyelesaian Probis Level 2, dengan bobot maksimal 15 (lima belas) persen. Variabel ini diukur berdasarkan penjabaran Probis Level 1 dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target tercapai apabila usulan Probis Level 2 sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
2. Penyelesaian Probis Level 3, dengan bobot maksimal 40 (empat puluh) persen. Variabel ini merupakan penjabaran Probis Level 2. Target tercapai apabila Probis Level 3 telah selesai disusun sesuai jumlah Probis Level 2 dan sudah

mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.

3. Identifikasi Judul SOP, dengan bobot maksimal 10 (sepuluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan hasil identifikasi judul SOP dengan berpedoman kepada Probis Level 3. Target tercapai apabila Matriks Identifikasi Judul SOP sudah mendapatkan verifikasi dan persetujuan dari Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi.
4. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 25 (dua puluh lima) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh pimpinan unit organisasi.
5. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Probis Level 2 dan Level 3, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Probis Level 2 dan Level 3 dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.
6. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 5 (lima) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 23. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

IK 11- Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					65	65	100	-	85	130,77

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP tahun 2025 sebesar 65% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 65%. Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan bila dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaiannya belum melampaui target Renstra, yaitu sebesar 130,77%.

Sementara jika IK ini dibandingkan dengan IK yang sama pada BPPMHKP diperoleh nilai sebagai berikut :

Tabel 24. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	65%	BPPMHKP	65%

Sumber: Nota Dinas Ka Biro SDMAO Nomor 88/SJ.3/OT.320/I/2026 tanggal 13 Januari 2025

Dari tabel di atas, capaian IK ini pada BPPSDMKP dan BPPMHKP menunjukkan besaran prosentase yang sama, yaitu 65%. Adapun faktor yang mendukung pencapaian IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP tahun 2025, antara lain :

- Keaktifan Pusat dan Unit Kerja dalam penyusunan proses bisnis lingkup BPPSDMKP
- Keaktifan Pusat dan Unit Kerja dalam penyusunan dan updating SOP lingkup BPPSDMKP

- Keaktifan PIC proses bisnis dan SOP untuk menyampaikan dokumen proses bisnis, peta lintas fungsi, identifikasi SOP lingkup BPPSDMKP ke Biro SDM Aparatur dan Organisasi

Kegiatan yang mendukung capaian IK Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP tahun 2025, yaitu penyampaian proses bisnis dan SOP BPPSDMKP terkait penataan organisasi ke Biro SDM AO.

INDIKATOR KINERJA 12

Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP

WBK adalah predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi sebagian besar Standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Unit Kerja yang Dibangun adalah Unit Kerja yang akan didampingi/diasistensi oleh Tim Penilai Internal BPPSDMKP dalam upaya memenuhi persyaratan indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses minimal 30 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangannya. Tim Pendamping dari BPPSDMKP menilai dan mendampingi unit kerja yang diusulkan sebagai WBK yang didampingi dalam memenuhi delapan indikator hasil dan dua puluh indikator proses. Selanjutnya Unit yang dibangun menuju predikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam SK Kepala BPPSDMKP. Penghitungan berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja dibangun menuju WBK pada tahun 2025 hasil pendampingan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 25. Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM
Lingkup BPPSDMKP**

IK 12- Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
8	10	13	16	19	5	5	100	-73,68	-	-

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPSDMKP tahun 2025 sebanyak 5 unit atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 unit. Capaian ini selama 5 (lima) tahun mengalami kenaikan, yaitu 2020 sebanyak 8 unit, 2021 sebanyak 10 unit, 2022 sebanyak 13 unit, dan pada tahun 2023 sebanyak 16 unit. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 73,68% dikarenakan Unit Kerja yang bisa dibangun pada tahun 2025 hanya bersisa 5 (lima) unit kerja yang menjadi capaian, selebihnya adalah unit kerja ex riset yang tidak bisa direkomendasikan untuk dibangun karena status OTK yang masih dalam proses, selain itu unit kerja pada satuan menengah juga ragu untuk direkomendasikan untuk dibangun karena beberapa unit kerja tersebut sudah tidak menerima taruna baru. Capaian Indikator kinerja ini belum bisa dibandingkan juga capaiannya dengan target Renstra.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian IK Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPSDMKP tahun 2025, antara lain :

- Penetapan Keputusan Kepala BPPSDMKP Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Organisasi yang dibangun menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPPSDMKP Tahun 2025;
- Optimalnya tndaklanjut hasil evaluasi penilaian Zona Integritas WBK pada Unit Organisasi yang dibangun menuju WBK dan WBBM;
- Komitmen penuh pimpinan dan seluruh pegawai Unit Organisasi yang dibangun menuju WBK dan WBBM dalam proses pembangunan ZI WBK.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IK Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM lingkup BPPSDMKP tahun 2025, yaitu penerbitan SK unit kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM, melakukan koordinasi dan pelaksanaan pendampingan pembangunan unit kerja yang diusulkan berpredikat menuju WBK dengan melakukan evaluasi penilaian zona integritas (ZI) WBK pada unit organisasi yang dibangun menuju WBK/WBBM, serta melakukan evaluasi penilaian zona integritas (ZI) WBK pada unit organisasi yang dibangun menuju WBK/WBBM pada 5 unit kerja lingkup BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA 13

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP

Indikator ini mengukur persentase capaian program penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025, yang telah diselesaikan hingga 31 Desember 2025. Penyelesaian dimaksud meliputi: (1) penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum; dan/atau (2) penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri.

Capaian dihitung dengan membandingkan jumlah peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan dalam Keputusan Menteri KP Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP Tahun 2025.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP

IK 13- Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	100	100	100	100	0	100	100

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP tahun 2025 sebesar 100%, atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 tidak ada kenaikan ataupun penurunan target pada tahun 2025. IK ini baru ada pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian yang sama sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target Renstra BPPSDM 2025-2029 maka capaian IK sebesar 100 %.

Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP tahun 2025 yaitu komitmen pimpinan dan unit pemrakarsa dalam penyusunan regulasi dan penyelesaiannya sesuai ketentuan, kualitas kepatuhan dalam menepati tenggat waktu dalam perencanaan program penyusunan Peraturan dan/atau Keputusan Menteri KP yang optimal, serta efektivitas koordinasi dengan Biro Hukum KKP.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP tahun 2025 yaitu melakukan analisa dan penyusunan rancangan KepMen/PerMen melalui progam penyusunan, hingga terbitnya 3 Peraturan Menteri KP dan 1 Keputusan Menteri KP.

INDIKATOR KINERJA 14

Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP

Indikator ini mengukur jumlah peraturan perundang-undangan berupa Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri yang disusun dan diajukan di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri (melalui mekanisme izin prakarsa) dalam rangka pelaksanaan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah disusun, disampaikan kepada Biro Hukum, dan dibahas dalam rapat internal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize.

Tabel 27. Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP

IK 14- Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	-	2	3	120	-	4	75

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP tahun 2025 sebanyak 3 rancangan, atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 2 rancangan. Indikator Kinerja ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan capaiannya dengan Rancangan IK Set.BPPSDM Tahun 2025-2029 telah tercapai sebesar 75 %.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian IK Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP tahun 2025, antara lain : 1) efektifnya koordinasi antara unit pemrakarsa, sekretariat BPPSDM dan Biro Hukum; 2) kelengkapan dan kualitas dokumen rancangan yang disusun beserta berkas pendukungnya; 3) kelengkapan dukungan substansi teknis dari unit terkait.

Sementara itu kegiatan yang mendukung pencapaian IK Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP tahun 2025, yaitu melakukan analisa dan penyusunan rancangan KepMen/PerMen melalui izin prakarsa, hingga terbitnya 3 Keputusan Menteri KP.

INDIKATOR KINERJA 15

Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani

Permasalahan hukum yang ditangani adalah advokasi hukum yang berkaitan dengan kepentingan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan proses penanganan oleh Sekretariat BPPSDMKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan KKP. Layanan advokasi hukum terdiri atas: konsultasi hukum, pendampingan hukum, dan penyelesaian perkara hukum.

Capaian diperoleh dari persentase jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani dibandingkan dengan jumlah permasalahan hukum yang dimintakan atau dimohonkan untuk dilakukan advokasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang ditangani tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 28. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani

IK 15- Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	100	100	100	100	0	100	100

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani tahun 2025 sebesar 100%, atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. IK ini baru ada pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian sebesar 100%, sehingga jika dibandingkan dengan capaian 2024, tidak ada kenaikan maupun penurunan capaian pada tahun 2025. Jika dibandingkan dengan target pada rancangan IK Set.BPPSDM 2025-2029 telah tercapai sebesar 100%.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian IK Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang ditangani tahun 2025, antara lain : 1) kecepatan pelaporan dan koordinasi unit kerja terhadap permasalahan hukum; 2) kelengkapan data dan bukti pendukung permasalahan hukum; 3) Sinergi dengan Biro Hukum KKP dan instansi terkait.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IK Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani tahun 2025, yaitu melakukan analisa dan melakukan penyusunan rancangan PerKa/PerKa, dan surat edaran, hingga terbitnya 203 Keputusan Kepala BPPSDMKP dan 7 Peraturan Kepala BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA 16

Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Sekretariat BPPSDMKP dalam mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum melalui penyusunan, pemrosesan, penandatanganan, serta otentifikasi dokumen kebijakan dan penetapan

dalam bentuk Peraturan Kepala BPPSDMKP dan/atau Keputusan Kepala BPPSDMKP. Proses penyusunan meliputi harmonisasi substansi, telaah hukum, penyusunan tata naskah, serta penetapan oleh Kepala BPPSDMKP.

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 29. Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP

IK 16- Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	-	110	210	120	-	120	175

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IK Proses Penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP tahun 2025 sebanyak 210 dokumen atau 120% dari target sebesar 110 dokumen. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 dan jika dibandingkan dengan target pada rancangan IK Set.BPPSDM 2025-2029 tercapai sebesar 175%.

Faktor yang menunjang keberhasilan yaitu adanya komitmen pimpinan dan pegawai yang memberikan layanan, kepatuhan terhadap pedoman pembentukan produk hukum dan prinsip kehati-hatian, serta efektivitas koordinasi lintas unit kerja.

Sementara kegiatan pendukung yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IK ini antara lain : 1) pendampingan permasalahan hukum lingkup BPPSDMKP pada satuan kerja AK Wakatobi, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Sorong, SUPM Sorong; 2) melakukan pendampingan permasalahan hukum lingkup BPPSDMKP pada Satuan Kerja AK Wakatobi, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Sorong dan SUPM Sorong.

INDIKATOR KINERJA 17

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/ formulasi pengukuran/ penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: pengelolaan Arsip Dinamis (50%), penciptaan arsip (25%), penggunaan arsip (25%), pemeliharaan arsip (25%), dan penyusutan arsip (25%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 30. Nilai pengawasan kearsipan internal BPPSDMKP

IK 17- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	99,39	80	98,89	120	-0,5	84	117,72

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP pada tahun 2025 senilai 98,89 atau sebesar 120% dari target senilai 80. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,5% dikarenakan adanya perubahan pengisian instrumen pengawasan kearsipan sehingga dalam pengisiannya terdapat kendala. Jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Renstra sebesar 117,72%.

Capaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada level 2 lingkup BPPSDM KP, sebagai berikut :

Tabel 31. Daftar Hasil Verifikasi Penilaian Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal

No.	Satuan Kerja	Persentase Capaian
1.	Sekretariat BPPSDM KP	98,89%
2.	Pusat Pendidikan KP	97,75%
3.	Pusat Penyuluhan KP	94,48%
4.	Pusat Pelatihan KP	94,38%

Dari tabel di atas, capaian IK ini pada Sekretariat BPPSDMKP masih pada prosentase paling tinggi dibanding eselon 2 lainnya lingkup BPPSDMKP, yaitu sebesar 98,89%. Keberhasilan ini didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- Dukungan pimpinan terhadap penyelenggaraan kearsipan;

- Penerapan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (SKKAA) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai yang meliputi ruang arsip, rak, boks arsip, dan alat pendukung lainnya;
- Aspek penciptaan arsip masih terdapat kesalahan penulisan atau format naskah dinas sehingga mengurangi penilaian.

Sementara kegiatan yang mendukung pencapaian IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP pada tahun 2025 antara lain :

- Sosialisasi PermenKP No. 13 Tahun 2025 tentang naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 8 September 2025;
- Pembinaan pengawasan kearsipan pada bulan Mei 2025 berupa pendampingan pengisian instrumen pengawasan kearsipan internal; serta pembinaan pengelolaan kearsipan pada Pusat Standardisasi dan Sertifikasi KP sebagai Satker baru lingkup BPPSDMKP;
- Penilaian pengawasan kearsipan oleh tim pengawasan kearsipan lingkup Pusat dan UPT BPPSDM;
- Evaluasi hasil penilaian pengawasan kearsipan lingkup BPPSDMKP

INDIKATOR KINERJA 18

Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di Lingkup Sekretariat BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini meliputi peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPSDMKP serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana berupa penambahan fasilitas untuk pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran baik itu pengadaan bangunan dan peralatan.

Formulasi pengukuran berdasarkan ketepatan Waktu Kontraktual yang tercantum pada Karwas Kontrak, SPK, dan BAST serta akselerasi belanja modal yang

dapat ditelaah dari Berita Acara Pembayaran Kontrak / BAPP dan Laporan Kinerja Bulanan/Tahunan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 31. Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di Lingkup Sekretariat BPPSDMKP

IK 18- Sarana Prasarana yang Ditingkatkan Kapasitas dan Pemanfaatannya di Lingkup Sekretariat BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	100	100	100	1	1	100	0	100	100

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian Indikator Kinerja Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) paket, atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1 (satu) paket. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, tidak ada kenaikan ataupun penurunan capaian. Capaian ini dari tahun 2022-2023 juga masih sama sebesar 100%, begitu juga jika dibandingkan dengan target pada rancangan IK Set.BPPSDM 2025-2029 capaian sebesar 100%.

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya IK Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025, yaitu sinergi antara perencanaan yang matang, dukungan anggaran, kompetensi SDM, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat faktor pendukung dan meminimalkan faktor kegagalan, pemeliharaan gedung dan perawatan perkantoran dapat meningkatkan kapasitas layanan serta mendukung kinerja organisasi secara optimal.

Sedangkan kegiatan yang mendukung pencapaian IK Sarana dan Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup BPPSDMKP Tahun 2025, yaitu pelaksanaan pemeliharaan perkantoran yang meliputi perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Gambir dan Ancol lingkup Sekretariat BPPSDM serta pemeliharaan kendaraan bermotor lingkup Sekretariat BPPSDMKP dengan rincian kendaraan roda 4 sebanyak 5 dan kendaraan roda 2 sejumlah 5.

INDIKATOR KINERJA 19

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Persentase RUP yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum SiRUP merepresentasikan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KKP.

Nilai indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan satuan unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan dihitung dari total pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengukuran IK ini dilakukan secara Triwulanan dengan polarisasi *Maximize*. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 32. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP

IK 19- Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					80	100	120		80	125

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP tahun 2025 sebesar 100% atau 120% dari target sebesar 80%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam perencanaan dan transparansi pengadaan. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian sama dengan target Renstra, yaitu sebesar 125%.

Capaian IK ini jika dibandingkan dengan IK sejenis pada BPPMHKP Tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 33. Rekapitulasi Data Hasil Perhitungan Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan TW IV TA 2025

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	100%	BPPMHKP	100%

Sumber: Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2025

Pada tabel di atas, capaian BPPSDMKP maupun BPPMHKP pada IK tersebut sama yaitu 100%. Keberhasilan pencapaian IK didukung oleh faktor-faktor antara lain : 1) Komitmen KPA dan PPK sebagai pengampu Anggaran dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemaketan Pengadaan segera setelah adanya DIPA terumumkan / Revisi DIPA; 2) Kompetensi / Pemahaman Mekanisme Pemaketan serta Pemahaman

Regulasi oleh Operator SIRUP di masing-masing Satuan Kerja; 3) Intensitas Tinggi dalam Koordinasi Internal Tri-Partid (Biro PBJ, Set. BPPSDM, dan Satuan Kerja).

Keberhasilan Capaian IK ini pada tahun 2025 didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu melakukan monitoring progress pengendalian PBJ pengisian formular klarifikasi SIRUP untuk belanja PBJ serta melakukan monitoring dan evaluasi penginputan rencana umum pengadaan BPPSDMKP dengan melakukan penilaian oleh Biro PBJ hingga terbitnya Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2025, tentang Rekapitulasi Data Hasil Perhitungan Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan TW IV TA 2025.

INDIKATOR KINERJA 20

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat tersebut diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Laporan RKBMN Tahun 2025 dan revisi (jika terdapat revisi) (bobot 5%)
 - b. RKAKL Tahun 2025 revisi terakhir (bobot 7,5%)
2. Dokumen usulan penetapan status penggunaan BMN TA 2025 sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Dokumen usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima atau surat keputusan penggunaan BMN (BAST/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Laporan BMN tahunan 2024 dan Semester I TA 2025 beserta surat penyampaian kepada Eselon I secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Surat Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup BPPSDM sebagai berikut :

Tabel 34. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP

IK 20- Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	77,5	90	90	90	80	93,14	116,43	3,49	84	110,88

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 93,14% atau 116,43% dari target sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 3,49%, dan dibandingkan dengan target rancangan IK Set.BPPSDM Tahun 2025-2029 telah tercapai sebesar 110,88%. Jika dibandingkan dengan IK sejenis lingkup BPPSDM level 2 Tahun 2025 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 35. Capaian Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BPPSDMKP TA 2025

No.	Satuan Kerja	Persentase Capaian
1.	Sekretariat BPPSDMKP	100%
2.	Pusat Penyuluhan KP	85%
3.	Pusat Pelatihan KP	80%
4.	Pusat Pendidikan KP	80%

Sumber: Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025

Berdasar tabel di atas, terlihat capaian Sekretariat BPPSDM pada IK ini masih paling tinggi dibanding eselon II lainnya lingkup BPPSDM, yaitu sebesar 100%. Adapun pendukung keberhasilan capaian IK ini antara lain :

- Dukungan Pimpinan Unit kerja dalam memberikan arahan dan penerapan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi dalam proses pencapaian Nilai kepatuhan pengelolaan BMN di lingkup BPPSDMKP;
- Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pencapaian kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Sinergi antara satuan kerja lingkup BPPSDMKP, Biro Keuangan KKP selaku Pengguna Barang, serta Kementerian Keuangan RI selaku Pengelola Barang;
- Penerapan aplikasi SIMAN versi 2 dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara, Sistem ini dirancang untuk memastikan seluruh proses pengelolaan Barang Milik Negara mulai dari perencanaan, penggunaan, pemindahtanganan, hingga penghapusan dilaksanakan secara tertib administrasi, terukur, dan transparan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IK Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BPPSDMKP TA 2025 antara lain :

- Penyusunan penatausahaan BMN, meliputi kegiatan penyusunan Laporan BMN semester I pada bulan Juli, yaitu Laporan BMN semester I tahun anggaran 2025 tingkat Sekretariat BPPSDMKP dan Laporan BMN semester I tahun anggaran 2025 tingkat BPPSDMKP;
- Pengendalian dan pengawasan BMN, meliputi kegiatan penyusunan pengawasan BMN semester I pada bulan Juli, yaitu Laporan Pengendalian dan pengawasan BMN semester I tahun anggaran 2025 tingkat Sekretariat BPPSDMKP dan Laporan Pengendalian dan pengawasan BMN semester I tahun anggaran 2025 tingkat BPPSDMKP;
- Verifikasi dan validasi usulan pemanfaatan dan penggunaan BMN lingkup BPPSDM

- Verifikasi dan validasi usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN lingkup BPPSDM
- Penyusunan RKBMN, meliputi kegiatan penyusunan RKBMN TA 2027 pada bulan Agustus dan September, yaitu Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2027 tingkat Sekretariat BPPSDMKP dan Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2027 tingkat BPPSDMKP.

INDIKATOR KINERJA 21

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No.3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan KIPP Tahun 2023. Pengukuran dilakukan pada Proposal inovasi yang masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 77.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 36. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP

IK 21- Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	81,52	80,24	77	87,10	113,12	8,55	81	107,53

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP Tahun 2025 senilai 87,10 atau sebesar 113,12% dari target senilai 77. IK ini ada dari tahun 2023 dengan capaian senilai 81,52, dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 8,55%, sedangkan jika dibandingkan dengan target Renstra, presentase capaian telah melampaui target Rensta sebesar 107,53%.

Capaian IK ini jika dibandingkan dengan BPPMHKP diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 37. Capaian IK Unit Kerja yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025 lingkup KKP

Unit Organisasi Eselon I	Capaian	Unit Organisasi Eselon I	Capaian
BPPSDMKP	87,10	BPPMHKP	77,34

Sumber: Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 4234/SJ.8/TU.140/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian BPPSDMKP senilai 87,10, sedangkan BPPMHKP senilai 77,34. Capaian BPPSDM lebih tinggi senilai 9,76 dari BPPMHKP. Keberhasilan capaian BPPSDM pada IK ini didukung oleh factor, yaitu komitmen pimpinan dan pengawalan bersama melalui rapat/koordinasi yang kontinyu dengan melibatkan tim Pusdatin, sinergi antara satuan kerja lingkup BPPSDMKP, Pusdatin selaku Koordinator, serta Kementerian PAN RB selaku Penyelenggara Inovasi. Walaupun IK ini menunjukkan keberhasilan, namun kendala juga ditemui dalam pelaksanaannya, yaitu kurangnya Kemampuan SDM dalam menyusun proposal inovasi dan Kurangnya persiapan UPT dalam penyediaan data dukung.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IK Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP Tahun 2025, yaitu : pembinaan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPSDM pada triwulan I dan melakukan penilaian proposal inovasi berdasarkan usulan dari UPT lingkup BPPSDM sejumlah 27 proposal usulan, dan setelah dilakukan seleksi administrasi dilakukan penilaian 26 proposal inovasi (1 tidak lolos seleksi), setelah dilakukan penilaian maka ditetapkan 3 proposal inovasi sebagai berikut : a) Locafit (BRBIH Depok); b) Bina BOSS Panen (BRPBATPP Bogor); c) Aqtes (BPPP Ambon); d) Dan selanjutnya disampaikan evaluasi tingkat KKP dan sehingga ketiganya ditetapkan MenKP sebagai inovasi

lingkup KKP dan diikutikan pada level nasional oleh KemenPan RB, dan ditetapkan kembali level nasional yaitu 2 inovasi Localfit dan Bina Boss.

INDIKATOR KINERJA 22

Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP

Indikator Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Indikator tersebut merupakan predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Berdasarkan Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 predikat tersebut memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% pada semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintah yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 2,5; Dan memiliki nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Keterbukaan Informasi Publik lingkup BPPSDMKP tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 38. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP

IK 22- Keterbukaan Informasi Publik lingkup BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	100	92	87,04	94,61	-12,96	96	90,67

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini tahun 2025 senilai 87,04 atau sebesar 94,61% dari target yang ditetapkan senilai 92. Capaian ini pada tahun 2023 senilai 100 dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12,96% dikarenakan penggunaan aplikasi evaluasi keterbukaan informasi publik yang baru sehingga unit kerja belum familiar. Sedangkan jika dibandingkan dengan target rancangan IK Set.BPPSDM 2025-2029 telah tercapai sebesar 90,67%.

Indikator ini pada tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan, yaitu :

- Kurangnya komitmen pimpinan dalam implementasi keterbukaan informasi publik
- Koordinasi yang kurang maksimal antara UPT - Pusat - Sekretariat
- Pergantian Penanggungjawab/operator PPID di UPT
- Sosialisasi penggunaan aplikasi evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang kurang familiar (aplikasi baru)

Pada tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IK Keterbukaan Informasi Publik lingkup BPPSDMKP, antara lain :

- Pembinaan keterbukaan informasi publik, meliputi kegiatan a) penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik lingkup BPPSDM tahun 2025 antara PPID BPPSDM dengan seluruh UPT lingkup BPPSDM; b) penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi

publik lingkup KKP tahun 2025 antara PPID KKP (Sekjen KKP) dengan seluruh eselon II (Sekretaris BPPSDMKP) lingkup KKP; c) penandatanganan komitmen bersama keterbukaan informasi publik lingkup Sekretariat BPPSDM tahun 2025 antara Sekretaris BPPSDM dengan seluruh Ketua Tim Kerja lingkup Sekretaris BPPSDM; d) Penerimaan penghargaan PPID terbaik KKP tahun 2024 untuk Sekretariat BPPSDMKP dan 3 UPT (BRPBATPP Sempur, BPPP Tegal, dan BPPP Banyuwangi); e) Penyusunan SOP Keterbukaan informasi publik lingkup BPPSDM tahun 2025; f) Penyusunan SOP Keterbukaan informasi publik lingkup Sekretariat BPPSDM tahun 2025; g) pembinaan melalui pertemuan persiapan monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik lingkup KKP; h) penerbitan SK daftar informasi publik tahun 2025 lingkup BPPSDM; i) penerbitan daftar informasi dikecualikan lingkup BPPSDM; j) Penyusunan maklumat pelayanan keterbukaan informasi publik Sekretariat BPPSDM

- Penilaian Keterbukaan informasi publik, meliputi kegiatan penghimpunan dokumen LKE KIP terkait penilaian keterbukaan informasi publik lingkup KKP, dengan nilai 87,04 untuk BPPSDMKP. Terdapat 1 (satu) UPT, yaitu Politeknik KP Kupang yang mengalami keterlambatan dalam melakukan upload dokumen pada dashboard penilaian keterbukaan informasi publik.

INDIKATOR KINERJA 23

Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini mengukur tingkat kepatuhan dalam pengelolaan data di lingkungan BPPSDMKP, yang direpresentasikan melalui jumlah tabel data yang dikelola sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan data BPPSDMKP merupakan penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam melakukan pengelolaan data yang dihitung berdasarkan persentase pembaruan (*updating*) dan kualitas data yang disajikan melalui Aplikasi ELATAR, ELAUT, dan Digiluh. Target tahunan ditetapkan berdasarkan jumlah tabel yang harus disiapkan, diverifikasi, dan divalidasi.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja ini termasuk kategori output dengan tingkat kendali rendah. Pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize.

Capaian Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP

IK 23- Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Sekretariat BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					80	98,44	120	-	84	117,19

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 98,44% atau 120% dari target sebesar 80%. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target pada rencana IK Set.BPPSDM tahun 2025-2029 tercapai sebesar 117,19%.

Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam menerapkan standar pengelolaan data, serta dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dan analisis data; Metadata dan format data yang terstandar sehingga memudahkan untuk pembaruan data; serta Tersedianya aplikasi (E-latar, E-Laut, Digiluh) dalam pengumpulan data terintegrasi.

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan antara lain: a) penyiapan pengelolaan standard data, dengan telah terbitnya Peraturan Kepala BPPSDMKP No 74 tahun 2025 tentang Tim Pengelola Data di lingkungan BPPSDMKP dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 94 tentang Data Utama di lingkungan KKP, serta telah disampaikan dokumen pendukung informasi geospasial terpadu UPT BPPSDM ke Pusdatin; b) verifikasi dan validasi data Pusat lingkup BPPSDMKP dalam rangka mendukung penyusunan Buku statistik pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan tahun 2025; c) Forum Data yang dilaksanakan secara daring bersamaan dengan Forum Jurnal Ilmiah, tanggal 23 April 2025.

INDIKATOR KINERJA 24

Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur persentase artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal yang sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku. Hal ini menjadi indikator kinerja dalam mendukung peningkatan mutu publikasi ilmiah di lingkungan BPPSDMKP.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP

IK 24- Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP										
Realisasi TW III					2025				Rancangan IK Set.BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
					85	101,26	119,13		89	113,78

Sumber: Aplikasi Kinerja

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 101,26% atau 119,13% dari target sebesar 85%. Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena IK ini merupakan indikator baru pada tahun 2025, namun jika dibandingkan dengan target pada rancangan IK Set.BPPSMKP tahun 2025-2029 tercapai sebesar 113,78%.

Faktor penyebab capaian IK Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP tahun 2025 antara lain:

- Kapasitas Tim Editorial yang memiliki kompetensi baik dari Editor, Mitra Bestari, dan Pengelola Jurnal
- Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Jurnal ilmiah sehingga mengenai format, kualitas, dan standar ilmiah yang harus dipenuhi.

- Infrastruktur sistem pengelolaan jurnal berbasis elektronik (OJS) yang memudahkan proses pengelolaan jurnal ilmiah
- Kualitas artikel dan kontribusi penulis mengirimkan artikel yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar ilmiah serta skop jurnal
- Komitmen pengelola jurnal dalam menjaga mutu substansi, etika publikasi, dan ketepatan waktu penerbitan.

Sekretariat BPPSDMKP telah melakukan beberapa kegiatan pendukung pencapaian IK yaitu :

- Penyusunan Laporan Pengelolaan Jurnal lingkup BPPSDMKP semester I dan II tahun 2025;
- Evaluasi jurnal sejumlah 27 jurnal dengan tahapan sebagai berikut :
 - Tata kelola dan manajemen jurnal, dengan melakukan identifikasi jumlah artikel yang masuk dengan jumlah artikel yang diterbitkan dan identifikasi capaian artikel terbitan sejumlah 123 dari target 187 artikel terbit.
 - Sistem OJS, dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan pengembangan sistem jurnal elektronik ke versi yang lebih stabil dan aman telah menjadi prioritas utama, serta melakukan uji keamanan dan stabilitas sistem elektronik jurnal setelah upgrade sistem OJS versi 3.
- Forum Pengelolaan Jurnal Ilmiah yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025.

INDIKATOR KINERJA 25

Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP

Nilai pada IK ini merupakan perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Satuan Kerja PNBP Lingkup BPPSDM, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Objek yang menjadi ruang lingkup PNBP yaitu pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Sedangkan dasar hukum yang menjadi acuan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNB, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNB, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian IK Nilai PNB pada Satker PNB Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 41. Nilai PNB pada Satker PNB Lingkup BPPSDMKP

IK 24- Nilai PNB pada Satker PNB lingkup BPPSDMKP										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDMKP Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	18,38	32,056	49,750	38,85	50,14	120	0,78	18,153	120

Sumber: Aplikasi Kinerjaaku

Capaian IK Nilai PNB pada Satker PNB Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 sebesar 50,14 Miliar, atau sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 38,85 Miliar. IK ini baru ada pada tahun 2022 dengan capaian 18,38 Miliar, dan terus naik pada tahun 2023 sebesar 32,056 Miliar. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 0,78%, dan jika dibandingkan dengan target Rancangan IK Set.BPPSDMKP tahun 2025-2029 tercapai sebesar 120%.

Faktor pendukung keberhasilan capaian IK Nilai PNB pada Satker PNB Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 antara lain komitmen dan dukungan yang baik secara material melalui penganggaran dan dukungan dari pimpinan serta didukung kesanggupan satuan kerja terhadap target PNB yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IK Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025 antara lain : a) monitoring pendapatan PNBK Satuan Kerja lingkup BPPSDM; b) penyusunan dan penyampaian proyeksi capaian PNBK lingkup BPPSDM; c) menyusun dan mengusulkan penerbitan maksimum pencairan PNBK ke Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dengan kegiatan pengusulan penerbitan maksimum pencairan PNBK dari BRPBAPPP Maros ke Sekretariat BPPSDMKP dan pengusulan penerbitan maksimum pencairan PNBK dari Kepala BPPSDM ke Direktur Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Pelaksanaan Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu; d) monitoring pendapatan PNBK BLU lingkup BPPSDM.

INDIKATOR KINERJA 26

Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak merupakan salah satu IK terkait Kerja Sama yang memiliki definisi yaitu Indikator yang menunjukkan proporsi (dalam bentuk persentase) dari jumlah keseluruhan rencana kerja sama di bidang penyuluhan serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang telah mendapat persetujuan resmi dari pimpinan masing-masing pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut. Dengan kata lain, ini mengukur berapa banyak dari total usulan kerja sama di bidang tersebut yang telah disepakati secara formal oleh pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali rendah. Sedangkan periode pengukuran dilakukan triwulanan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja ini tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 42. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak

IK 27- Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Disetujui Pimpinan Para Pihak										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	-	40	43,41	108,53		50	86,82

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 43,41% atau 108,53% dari target sebesar 40%. Indikator Kinerja ini sejak tahun 2022 telah digunakan tetapi menggunakan formula perhitungan yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target rancangan IK Set.BPPSDMKP 2025-2029 tercapai sebesar 86,82%.

Keberhasilan capaian IKU ini ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain: 1) Komunikasi intensif, terbuka, dan terstruktur; 2) Koordinasi untuk menimalisir kekeliruan dan mempercepat pemahaman substansi selama proses perumusan perjanjian kerja sama; 3) Arahan dan pandangan dari pimpinan terkait rencana serta peluang kerja sama yang akan disusun.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian ini, yaitu melakukan koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi penyusunan, telaah, finalisasi dan administrasi dokumen kerja sama.

INDIKATOR KINERJA 27

Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati

Pelaksanaan kerja sama menjadi salah satu Indikator Kinerja dan merupakan aspek strategis yang mendukung pencapaian tujuan BPPSDMKP, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, sektor swasta, organisasi internasional, dan masyarakat, guna memperkuat efektivitas program serta mendukung kebijakan Ekonomi Biru dan lima program prioritas KKP.

Indikator Kinerja ini merupakan rasio implementasi kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dengan jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan internasional yang masih berlaku di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan semesteran dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja ini tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 43. Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati

IK 27- Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati											
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029	
-	-	-	-	-	60	65,49	109,15	-	53	120	

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 65,49%, atau sebesar 109,15% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan target rancangan IK Set.BPPSDM 2025-2029 tercapai 120%.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian IK Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati tahun 2025 ini, yaitu keefektifan koordinasi dan komunikasi, mekanisme komunikasi rutin (rapat koordinasi, PIC yang jelas, grup koordinasi) yang membantu penyelesaian kendala teknis secara cepat dan menjaga keselarasan pelaksanaan kegiatan, serta komitmen dan dukungan pimpinan kedua belah pihak. Dukungan manajerial dan kebijakan dari pimpinan menjadi kunci kelancaran koordinasi, pengambilan keputusan, serta penyediaan sumber daya (SDM, anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai)

Kegiatan pendukung capaian IK ini, yaitu dilakukan koordinasi dan pelaksanaan monitoring tindaklanjut kerja sama yang disepakati pada semester I dan II.

INDIKATOR KINERJA 28

Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan merupakan tingkat kesesuaian pelaksanaan kerja sama penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam mendukung tercapainya kinerja dan program prioritas organisasi dengan dokumen kerja sama yang disepakati di tahun berjalan.

Tingkat Validitas Indikator Kinerja merupakan output tingkat kendali tinggi. Sedangkan periode pengukuran dilakukan tahunan dengan polarisasi maximize. Capaian Indikator Kinerja Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 43. Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

IK 28- Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan										
Realisasi					2025				Rancangan IK Set. BPPSDM Tahun 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	-	65	73,21	112,63	-	70	104,59

Sumber: Aplikasi Kinerjaku

Capaian IK ini tahun 2025 sebesar 73,21%, atau sebesar 112,63% dari target yang ditetapkan sebesar 65%. IK ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025, sehingga tidak bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target rancangan IK Set.BPPSDMKP tahun 2025-2029 tercapai sebesar 104,59%.

Faktor pendukung keberhasilan IK ini tahun 2025 antara lain : 1) keselarasan tujuan strategis para pihak; 2) rencana kerja kegiatan dan target yang terukur; 3)

ketersediaan anggaran, SDM, dan sarana prasarana yang konsisten selama periode kerja sama; 4) kepercayaan dan hubungan kemitraan yang baik

Kegiatan pendukung capaian IK ini, yaitu melakukan koordinasi dan pelaksanaan monitoring kerjasama yang disepakati dan mendukung program BPPSDM dengan melakukan penelaahan terhadap dokumen kerjasama, serta penyusunan materi audiensi pimpinan dengan mitra potensial kerjasama sebanyak 13 dokumen.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 3 Januari 2025, pagu anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 32.723.122.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.133.343.068,- atau sebesar 98,20 % terhadap pagu efektif dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 44. Realisasi Anggaran Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	Layanan Manajemen Keuangan	276.329.000	204.110.234	99,48
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP				
3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP				
4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	Layanan Perkantoran	29.772.085.000	29.194.196.014	98,10
5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	135.000.000	133.843.974	99,14

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP				
7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	755.290.000	753.611.859	99,78
8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas				
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Layanan Manajemen SDM	276.545.000	275.734.130	99,71
10	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	90.290.000	85.960.900	95,21
11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP				
12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP				
13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	Layanan Hukum	78.900.000	76.083.497	96,43
14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP				
15	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP				
16	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	Layanan Bantuan Hukum	61.100.000	59.045.749	96,64

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	113.532.000	112.754.520	99,32
18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	Layanan Umum	512.031.000	510.500.764	99,70
19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	Layanan BMN	125.000.000	124.464.342	99,57
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP				
21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	153.230.000	151.557.847	98,91
22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP				
23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP	59.990.000	59.858.532	99,78
24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	Layanan Data dan Informasi	40.000.000	40.000.000	100
25	Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP	Layanan Manajemen Keuangan	0	0	0
26	Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP				

INDIKATOR KINERJA		KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%
27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	Layanan Kerja Sama	356.541.000	351.620.706	98,62
28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati				
29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan				
TOTAL			32.723.122.000	32.133.343.068	98,20

Sumber: Pengelola Keuangan Sekretariat BPPSDMKP per 3 Januari 2026

Secara umum anggaran Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025 dapat dimanfaatkan cukup baik dengan realisasi anggaran mencapai 98,20% dari pagu.

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, beberapa hal perlu mendapatkan perhatian yang merupakan kondisi yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain adanya keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyiapan dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat proses pembayaran.

3.4. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA SEKRETARIAT BPPSDMKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran sebagaimana dilakukan dengan mengukur: a). efektivitas penggunaan anggaran; dan b). efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas sebagaimana dimaksud pada diukur berdasarkan capaian Keluaran dan hasil/*outcome*. Dalam rangka penghitungan efisiensi anggaran pada Laporan Kinerja BPPSDMKP Tahun 2025, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran.

Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih selisih antara capaian kinerja dengan presentase realisasi anggaran, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 45. Nilai Efisiensi Sumber Daya BPPSDMKP Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	Efisiensi
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	108,09	276.329.000	204.110.234	99,48	8,61
2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	120,00				
3	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	106,86				
4	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	104,91	29.772.085.000	29.194.196.014	98,10	6,76
5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	101,27	135.000.000	133.843.974	99,14	2,13

INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	Efisiensi
6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	120,00				
7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	120,00	755.290.000	753.611.859	99,78	20,22
8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	112,50				
9	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	105,69	276.545.000	275.734.130	99,71	4,74
10	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM	104,45	90.290.000	85.960.900	95,21	10,48
11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	100,00				
12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	100,00				
13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	100,00	78.900.000	76.083.497	96,43	3,57
14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	120,00				
15	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	120,00				

INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	Efisiensi
16	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	100,00	61.100.000	59.045.749	96,64	23,36
17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	120,00	113.532.000	112.754.520	99,32	20,68
18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP	100,00	512.031.000	510.500.764	99,70	0,30
19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	120,00	125.000.000	124.464.342	99,57	20,43
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	116,43				
21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	113,12	153.230.000	151.557.847	98,91	14,21
22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	94,61				
23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	120,00	59.990.000	59.858.532	99,78	20,22
24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	119,13	40.000.000	40.000.000	100	19,13
25	Nilai PNBP pada Satker PNBP Lingkup BPPSDMKP	120,00	0	0	0	120
27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	108,53	356.541.000	351.620.706	98,62	10,53

INDIKATOR KINERJA		% CAPAIAN KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	%	Efisiensi
	Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak					
28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	109,15				
29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	112,63				
		110,51	32.723.122.000	32.133.343.068	98,20	12,31

Sumber :

*Aplikasi Kinerjaku,

***Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa skor kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025 adalah sebesar 110,51%, sedangkan realisasi anggaran telah mencapai 98,20%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tersebut telah menghasilkan efisiensi sebesar 12,31% yang didapatkan dari selisih nilai pencapaian kinerja dengan presentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Efisiensi anggaran BPPSDMKP memperoleh skor +12,31 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan pada level plus.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini berarti mengurangi pemborosan, baik dalam bentuk pengeluaran yang tidak perlu maupun dalam bentuk alokasi sumber daya yang tidak

optimal. Efisiensi bukan hanya soal menghemat uang, tetapi juga tentang menggunakan anggaran secara strategis untuk menciptakan dampak yang maksimal.

Untuk meningkatkan nilai efisiensi terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan prioritas dan mengurangi kegiatan bersifat seremoni;
2. Membagi habis pekerjaan kepada pegawai Sekretariat BPPSDMKP sesuai cascading sehingga dapat meminimalisir ketidaksesuaian pencapaian target dan waktu;
3. Melakukan pengelolaan resiko sehingga permasalahan dapat terdeteksi di awal dan segera diselesaikan sebelum menjadi permasalahan yang lebih berat dan membutuhkan anggaran lebih besar.
4. Pengendalian serta peningkatan ketertiban pegawai dalam implementasi penggunaan dana sesuai rencana, dan atau memperbaharui rencana penggunaan dana apabila terjadi penyesuaian nilai dan waktu penyerapan sehingga realisasi yang direncanakan dengan realisasi sebenarnya bertaut positif yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai efisiensi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

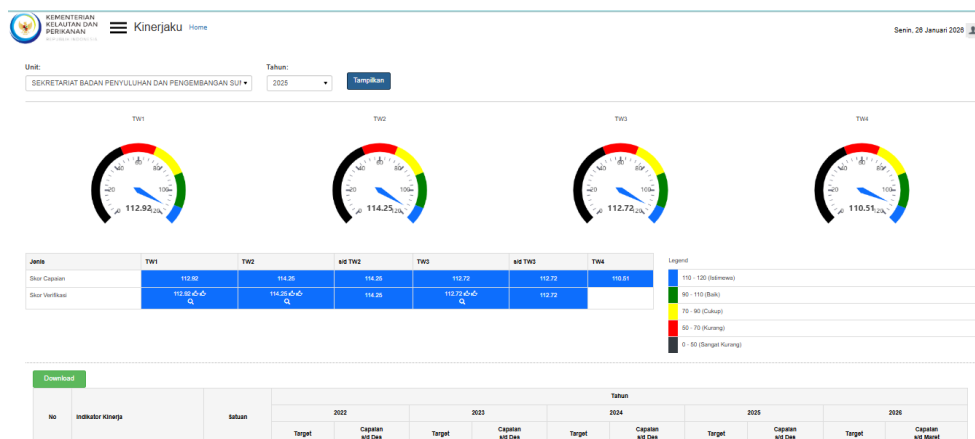
4.1. KESIMPULAN

Pada Tahun 2025, Sekretariat BPPSDMKP, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Sasaran kegiatan tersebut dijabarkan menjadi 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja (IK), yang masing-masing didukung oleh alokasi anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan dan prioritas program, namun pada tanggal 4 Desember 2025, dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP tahun 2025, dimana dalam PK tersebut Sekretariat memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja (IK).

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat BPPSDM Tahun 2025 tercatat sebesar 110,51 dengan predikat istimewa, mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada Tahun sebelumnya yang sebesar 103,53.

Dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang diukur pada periode tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 14 IK berkinerja **Istimewa**
- 14 IK berkinerja **Baik**



Gambar 5. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025
Sumber: Aplikasi kinerjaku

Adapun rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 46. Capaian Kinerja Sekretariat BPPSDMKP Tahun 2025

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 4 2025	Capaian 2025	%
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP	%	85	85	91,88	108,09
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP	%	≤0,5	≤0,5	0,06	120,00
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP	%	92	92	96,52	104,91
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP	Level	3,5	3,5	3,74	106,86
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP	Nilai	88	88	89,12	101,27
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP	Nilai	81,5	81,5	98,53	120,00
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP	Nilai	1,5	1,5	2,00	120,00
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas	%	80	80	90	112,50
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP	Nilai	76	76	79,38	104,45
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP	Indeks	81	81	85,61	105,69
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP	%	65	65	65	100,00
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP	Satker	5	5	5	100,00

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 4 2025	Capaian 2025	%
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP	%	100	100	100	100,00
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP	rancangan	2	2	3	120,00
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani	%	100	100	100	100,00
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP	dokumen	110	110	210	120,00
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP	Nilai	80	80	98,89	120,00
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekretariat BPPSDM KP	unit	1	1	1	100,00
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP	%	80	80	100	120,00
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP	%	80	80	93,14	116,43
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP	Nilai	77	77	87,10	113,12
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	Nilai	92	92	87,04	94,61
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP	%	80	80	98,44	120,00
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP	%	85	85	101,26	119,13

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Target TW 4 2025	Capaian 2025	%
		25	Nilai PNBP BPPSDMKP	Miliar	38,85	38,85	50,14	120,00
		26	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak	%	40	40	43,41	108,53
		27	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati	%	60	60	65,49	109,15
		28	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	%	65	65	73,21	112,63

Sumber: Aplikasi kinerjaaku

4.2. REKOMENDASI

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPSDM tahun 2025 menunjukkan hasil kinerja yang baik, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **110,51%** atau di atas 100%, namun belum seluruh Indikator Kinerja (IK) pada tahun 2025 tercapai dari target yang ditetapkan, yaitu IK 22. Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rekomendasi yang disampaikan agar: 1) capaian kinerja diupayakan lebih baik pada tahun 2025 dengan melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara sistematis dan berkala, khususnya terhadap indikator yang belum mencapai target dan juga indikator kinerja pendukung capaian “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDM” tahun 2026, 2) dalam rangka memitigasi indikator-indikator yang mengalami hambatan serta menyusun rencana aksi perbaikan yang terukur dan dapat dieksekusi dalam waktu yang tepat, guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level)	3,5
		5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPSDMKP (%)	81
		6	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	88
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	81,5
		8	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP(Nilai)	1,5
		9	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%)	80
		10	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai)	76
		11	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	82
		12	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%)	65
		13	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker)	5
		14	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP (%)	100
		15	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)	2
		16	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		17	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen)	80
		18	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai)	80
		19	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP (unit)	1
		20	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP (%)	80
		21	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%)	80
		22	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai)	77
		23	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP	92
		24	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%)	80
		25	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%)	85
		26	Nilai PNBK pada Satker PNBK Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	14,250
		27	Nilai PNBK pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	18,153
		28	Persentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	40
		29	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	45
		30	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	56.170.084.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM)	64.189.144.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		120.359.228.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

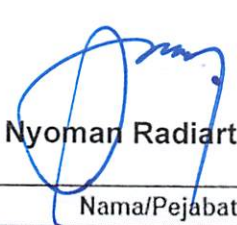
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

No	Nama/Pejabat	Paraf
1.	KaTimja Program	
2.		



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level)	3,5
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	81,5
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP (Nilai)	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%)	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai)	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	81
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%)	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker)	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP (%)	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		16 Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen)	100
		17 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai)	80
		18 Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP (unit)	1
		19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP (%)	80
		20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%)	80
		21 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai)	77
		22 Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP (Nilai)	92
		23 Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%)	80
		24 Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%)	85
		25 Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	14,250
		26 Nilai PNPB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	24,603
		27 Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	40
		28 Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	60
		29 Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	55.968.029.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	64.189.144.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		120.157.173.000

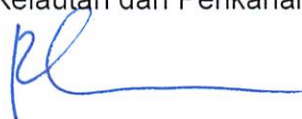
Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin

No	Nama/Pejabat	Paraf
1.	KaTimja Program	
2.		

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	55.968.029.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	64.189.144.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		120.157.173.000

Jakarta, 11 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

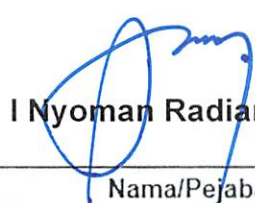
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta


Joni Haryadi D

No	Nama/Pejabat	Paraf
1.	KaTimja Program	
2.		



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta


Joni Haryadi D

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP (Level)	3,5
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP (Nilai)	81,5
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDMKP (Nilai)	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDMKP yang berkualitas (%)	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDMKP (Nilai)	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	81
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDMKP (%)	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDMKP (Satker)	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDMKP (%)	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDMKP (Rancangan)	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDMKP yang Ditangani (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDMKP (dokumen)	110
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDMKP (Nilai)	80
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDMKP (paket)	1
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDMKP (%)	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP (%)	80
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP (Nilai)	77
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDMKP (Nilai)	92
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDMKP (%)	80
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDMKP (%)	85
		25	Nilai PNPB pada Satker PNPB Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	14,250
		26	Nilai PNPB pada Satker BLU Lingkup BPPSDMKP (Miliar)	24,603
		27	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	40
		28	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	60
		29	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	28.096.561.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	43.777.215.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		71.873.776.000

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Joni Haryadi D

No	Nama/Pejabat	Paraf
1.	KaTimja Program	
2.		

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat BPPSDM	28.096.561.000
2.	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker (Satker Binaan Sekretariat BPPSDMKP)	43.777.215.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		71.873.776.000

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

Pihak Kesatu
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Joni Haryadi D



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joni Haryadi D**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDM KP (%)	85
		2	Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM KP (%)	≤0,5
		3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	92
		4	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDM KP (Level)	3,5
		5	Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM KP (Nilai)	88
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDM KP (Nilai)	81,5
		7	Nilai Komponen Penetapan Tujuan pada Penilaian Mandiri Maturitas SPIP BPPSDM KP (Nilai)	1,5
		8	Indeks perencanaan anggaran BPPSDM KP yang berkualitas (%)	80
		9	Nilai Pembangunan Integritas BPPSDM KP (Nilai)	76
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM KP (Indeks)	81
		11	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPSDM KP (%)	65
		12	Unit Kerja yang dibangun berpredikat WBK/WBBM Lingkup BPPSDM KP (Satker)	5
		13	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPSDM KP (%)	100
		14	Penyelesaian Penyusunan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri Melalui Izin Prakarsa Lingkup BPPSDM KP (Rancangan)	2
		15	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan BPPSDM KP yang Ditangani (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16	Proses penyusunan Peraturan dan Keputusan Kepala BPPSDM KP (dokumen)	110
		17	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM KP (Nilai)	80
		18	Sarana Prasarana yang ditingkatkan kapasitas dan pemanfaatannya di lingkup Sekertariat BPPSDM KP (paket)	1
		19	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPSDM KP (%)	80
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP (%)	80
		21	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDM KP (Nilai)	77
		22	Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BPPSDM KP (Nilai)	92
		23	Persentase Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data BPPSDM KP (%)	80
		24	Pengelolaan Penerbitan Artikel Jurnal Ilmiah KP Terstandar BPPSDM KP (%)	85
		25	Nilai PNBP Lingkup BPPSDM KP (Miliar)	38,853
		26	Presentase Kesepakatan Kerja Sama Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Yang Disetujui Pimpinan Para Pihak (%)	40
		27	Persentase Pelaksanaan Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang telah Disepakati (%)	60
		28	Efektifitas Kerja Sama Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	32.723.122.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Satker Binaan Sekretariat BPPSDM KP)	43.370.651.000
Total Anggaran Lingkup Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		76.093.773.000

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D